

**EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN KELURAHAN WONOKUSUMO
TERHADAP PROGRAM PADAT KARYA DISPENDUKCAPIL
SURABAYA**

Camelle Aqila

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
aqilaelle@gmail.com;

Hasan Ismail

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
hasanismail@untag-sby.ac.id;

Eddy Wahyudi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ediwahyudi@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multifaset karena terkait dengan kurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mengakses bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya ekonomi kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah pemberian dukungan dan perlindungan usaha kecil dan kelas ekonomi bawah agar lebih berkembang. Partisipasi dan kemandirian adalah dua prinsip yang membentuk inti dari stabilitas padat karya perkotaan. Padat Karya merupakan kegiatan penguatan masyarakat (termasuk pekerja miskin, pengangguran, dan masyarakat bersenjata). Penelitian kualitatif akan digunakan selama berlangsungnya penelitian ini sebagai strategi implementasi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil langsung dari tempat praktek. Data sekunder berasal dari artikel jurnal dan referensi lainnya. Wilayah Kantor Kelurahan Wonokusumo di Surabaya menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah baru-baru ini menerapkan kebijakan upah untuk inisiatif padat karya. Ditetapkan bahwa pelaksanaan program padat karya yang disampaikan dengan manajemen yang baik akan menjadi cara yang efektif yang akan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Kata Kunci: *efektivitas, kinerja, pelayanan, program padat karya*

ABSTRACT

Poverty is a multifaceted problem because it is related to the lack of ability to participate in society and access economic, social, cultural, and political fields. The government seeks to encourage the growth of small economies to meet the needs of the community and especially to meet daily needs. One of them is the provision of support and protection for small businesses and the lower economic class to develop more. Participation and self-reliance are two principles that form the core of urban labor-intensive stability. Labor intensive is an activity to strengthen society (including poor workers, unemployed, and armed communities). Qualitative research will be used during this research as an implementation strategy, with the aim of describing an event or events that have occurred in the field. The primary data used in this study were obtained from observations, interviews, and documentation taken directly from the practice. Secondary data comes from journal articles and other references. Wonokusumo Village Office area in Surabaya is the location for the research. The result of this study is that the government has recently implemented wage policies for labor-intensive initiatives. It was determined that the implementation of labor-intensive programs delivered with good management would be an effective way that would reduce unemployment and poverty.

Keywords: *effectiveness, performance, service, labor intensive programs*

A. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan Orde Baru, pembangunan desa tumbuh menjadi ikon dan legenda yang signifikan. Berbicara tentang pembangunan adalah efek samping yang diperlukan dari pembahasan orde baru. Pembentukan “pembangunan desa” juga merupakan hasil dari Orde Baru.

Peningkatan kesejahteraan umat manusia atau masyarakat suatu bangsa merupakan tujuan utama pembangunan, yang merupakan proses perubahan yang disadari, terencana, dan berkelanjutan. Artinya, agar suatu bangsa dapat mencapai tujuan nasionalnya, pembangunan harus selalu bergerak dari kondisi atau keadaan kehidupan yang buruk ke keadaan yang lebih baik.

Menurut Muljana (2011:11), Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sama-sama bersifat materialistis dan spiritual. Melalui peran dan bantuan yang diberikan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, untuk kebaikan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan merupakan masalah multifaset karena terkait dengan kurangnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mengakses bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Nurwati, 2008). Masalah kemiskinan belum terselesaikan. Pemerintah Surabaya (Dispendukcapil) berupaya mengatasi masalah ini dengan melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP) yang di dalamnya termasuk Program Padat Karya Perkotaan (PKP).

Pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya ekonomi kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah pemberian dukungan dan perlindungan usaha kecil dan kelas ekonomi bawah agar lebih berkembang. Banyak manfaat yang akan dihasilkan dari pertumbuhan usaha kecil, yakni selain pertumbuhan sektor real estate dan kontribusinya terhadap perekonomian, juga akan menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

Secara umum, usaha kecil dan mikro memiliki keunggulan dalam industri seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, ritel, dan industri makanan di mana sumber daya alam digunakan dan tenaga kerja intensif. Di bidang perhotelan, keuangan, persewaan, jasa, bisnis, dan pertanian, usaha kecil dan menengah bisa mendapatkan keuntungan dari perolehan nilai. Pemrosesan gas, listrik, dan komunikasi serta industri konstruksi menguntungkan bisnis besar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara usaha kecil (mikro), menengah, dan besar.

Industri kecil berperan dalam pembangunan negara, dan tidak hanya dalam hal menarik tenaga kerja; mayoritas usaha kecil padat karya ini berkontribusi pada penyediaan mata uang untuk negara. Dalam situasi seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pertumbuhan industri dalam negeri guna mendukung struktur ekonomi yang lebih mandiri di tengah industrialisasi dalam lingkungan global yang sangat kompetitif.

Upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran didasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menyediakan lapangan kerja yang ada berdasarkan perjanjian kerja yang memasukkan unsur upah, pekerjaan, dan tunjangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3. Melibatkan masyarakat dalam program padat karya ini merupakan tujuan pemerintah.

Karakteristik masyarakat itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Asumsi yang mendasarinya adalah keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan penting untuk memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan produksi dan produktivitas guna memenuhi tujuan masyarakat. Untuk dapat mengurangi sebagian dari ketergantungan mereka pada pemerintah, anggota masyarakat berupaya meningkatkan kemampuan dan kemauan sumber daya manusia mereka (Adisasmita, 2006:36).

Partisipasi dan kemandirian adalah dua prinsip yang membentuk inti dari stabilitas padat karya perkotaan. Peran serta masyarakat yang signifikan dan signifikan terlihat dari pelaksanaan dan pengembangan program desa (Supriyadi, 2010: 152). Untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan itu sendiri, diperlukan partisipasi dari setiap warga Kelurahan. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan berharap dapat terus berjalan dengan sendirinya.

Menurut Suryana, partisipasi masyarakat merupakan suatu perikatan. Untuk menjaga kesetaraan, diperlukan kerjasama pada semua tahapan proses pembangunan dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari analisis situasi dan

berlanjut pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi serta tahap pemantauan dan evaluasi.

Keberhasilan program tersebut sebagian besar disebabkan oleh kemampuan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warganya. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang manusiawi dan bermartabat serta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial di Surabaya dan seluruh wilayah lain yang termasuk kota.

Sejumlah besar pekerja yang menganggur dan setengah menganggur dipekerjakan atau menjalankan tugas pekerjaan yang dianggap “padat kerja”. Tujuan Padat Karya: a. Menawarkan kesempatan kerja kepada pekerja dari keluarga pekerja yang menganggur atau setengah menganggur. b. Memanfaatkan sumber daya tenaga kerja sambil meningkatkan kapasitas orang untuk bekerja. c. Ia menerima penghasilan tambahan atau pendapatan bagi pekerja berupah rendah dari keluarga kelas pekerja.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, aksesibilitas, dan kebaikan bersama, Padat Karya merupakan kegiatan penguatan masyarakat (termasuk pekerja miskin, pengangguran, dan masyarakat bersenjata) melalui pemeliharaan infrastruktur secara lugas dan kegiatan produktif lainnya yang memanfaatkan sebaik-baiknya ketersediaan lokal sumber daya. Program Padat Karya juga merupakan program yang bersinergi dengan program lain yaitu Pemantapan Masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di kota-kota kecil.

Salah satu kota di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 3.157.126 jiwa pada tahun 2020 adalah kota Surabaya. Dan tingkat pengangguran di Surabaya adalah 7,62 persen dari jumlah penduduk. Kelurahan Wonokusumo yang berpenduduk 70.000 jiwa menjadi fokus penelitian ini. Penyusutan masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan, sehingga banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pengangguran. Apakah masalah ekonomi kelas menengah ke bawah dapat diselesaikan dengan Program Padat Karya?

B. METODE

Penelitian kualitatif akan digunakan selama berlangsungnya penelitian ini sebagai strategi implementasi, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil langsung dari tempat praktek. Data sekunder berasal dari artikel jurnal dan referensi lainnya. Kantor Kelurahan Wonokusumo di Surabaya menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Tahap persiapan mengarah ke pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui keadaan dan kegiatan yang dilakukan di kantor Wonokusumo, persiapan dilakukan dengan mengunjungi kantor desa.

Langkah selanjutnya adalah melihat upaya apa yang dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas program dari Dispendikcapil yaitu program padat karya di masyarakat desa Wonokusumo setelah mempresentasikan diri di lembaga

tempat pelatihan diadakan dan mengenali masalah yang ada saat ini, khususnya fakta bahwa masih banyak orang yang kekurangan pekerjaan. Tentu saja, masyarakat atau warga desa Wonokusumo menjadi fokus kegiatan penelitian ini, terutama mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Istilah “efektivitas” digunakan untuk menggambarkan suatu komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam artikel jurnal karya Iga Rosalina berjudul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat”.

Bergantian, jika tujuan tidak dapat dicapai dengan cara yang dimaksud, ini bukan merupakan efektivitas. Pencapaian tujuan berfungsi sebagai kriteria atau tolok ukur efektivitas yang dijelaskan oleh Richard M. Steers.

Padat Karya

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Politik padat karya adalah salah satunya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan program padat karya sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak program padat karya. Hal ini dicapai pada tahun 2017 dengan penerbitan bersama empat keputusan menteri tentang sinkronisasi dan penguatan tersebut (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpungung, dan Transmigrasi (PDDT)). Desa harus mematuhi aturan sesuai Pasal 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penciptaan lapangan kerja di desa harus mendapatkan sekurang-kurangnya 30% dari total dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, dengan besaran hibah masyarakat ditetapkan melalui musyawarah strategi pembangunan (Musrembang).

Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memungkinkan para penganggur untuk menghidupi keluarga mereka. Kebijakan padat karya ditujukan bagi mereka yang mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan karena kurangnya daya saing untuk pekerjaan di daerah pedesaan atau perkotaan, membuat mereka berpotensi menganggur.

Teguh Dartanto mengklaim bahwa Padat Karya termasuk proyek publik seperti penciptaan kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur daerah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Mengingat banyaknya tenaga kerja tidak terlatih di Indonesia, Habibie menilai pengembangan industri padat karya cukup tepat. Perbaikan jalan, kanal, dan infrastruktur lainnya merupakan jenis pekerjaan padat karya yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran.

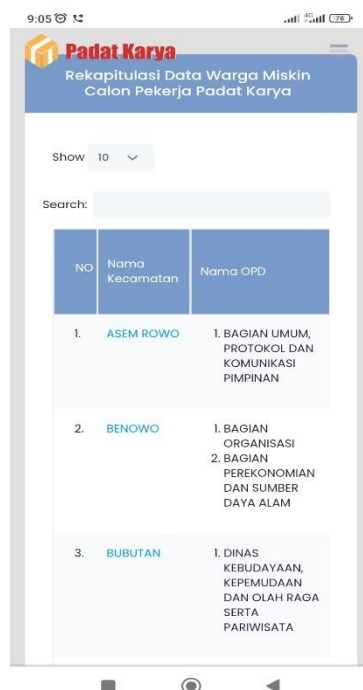
Aktivitas pengembangan yang menggunakan lebih banyak energi manusia daripada tenaga mesin disebut “bekerja secara intensif”. Tujuan utama dari program padat karya ini adalah untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan tetap.

Program padat karya ini juga sejalan dengan janji Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung percepatan pencegahan pembunuhan melalui pemanfaatan yang lebih baik. Inisiatif pemerintah yang dikenal dengan Dana Desa bertujuan untuk mengurangi dampak keuangan dari pandemi Covid-19 terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Program padat karya Kementerian Perhubungan didasarkan pada Verifikasi Tata Cara Pelaksanaan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 No. 73. Tujuan dari program padat karya termasuk mengurangi pengangguran dan penahanan serta mendorong keterlibatan masyarakat, pemahaman lintas budaya, dan rasa memiliki. Berdasarkan strategi penguatan masyarakat, akan terwujud akses yang lebih baik terhadap layanan esensial bagi perempuan, anak, dan kelompok marginal, serta peningkatan kualitas dan kuantitas penguatan masyarakat. Melalui kegiatan pembangunan yang dikelola sendiri dan padat uang, masyarakat dapat menciptakan kegiatan sosial dan ekonomi serta kesempatan kerja.

Untuk melihat tampilan ke web padat karya Surabaya mengenai rekapitulasi data warga, sebagai berikut:

- a. Untuk melihat rekapitulasi data warga miskin calon pekerja padat karya, target survei, hasil survei, rekap kecamatan, rekap intervensi, data per intervensi kegiatan opd, dan hasil verifikasi kecamatan. Maka dapat memilih dashboard surei warga miskin pada beranda dashboard padat karya.



NO	Nama Kecamatan	Nama OPD
1.	ASEM ROWO	1. BAGIAN UMUM, PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
2.	BENOWO	1. BAGIAN ORGANISASI 2. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.	BUBUTAN	1. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

Gambar 1. Rekapitulasi Data Warga Miskin Calon Pekerja Padat Karya

- b. Dari tampilan rekapitulasi data warga miskin calon pekerja padat karya diatas dapat dilihat berapa jumlah KK yang ada di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir yang termasuk kategori bersedia menjadi calon pekerja dan yang tidak bersedia, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut

merupakan rekapitulasi data warga miskin calon pekerja padat karya.

Jumlah Warga Miskin	Jumlah Anggota Keluarga Inti	Jumlah Warga Usia 18 - 60 Th	Jumlah Warga Usia > 60 Th	Jumlah Warga Non produktif	Jumlah Bersedia	Jumlah Tidak Bersedia
14.785	14.103	8.648	1.653	1.003	1.915	2.254
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa
4.607	4.582	3.886	1.374	804	1.750	2.212
KK	KK	KK	KK	KK	KK	KK

Gambar 2. Data jumlah warga Miskin Calon Pekerja Pada Karya

Kinerja

Salah satu dari lima kelurahan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya yaitu kelurahan Wonokusumo. Dengan 70.000 penduduk, kelurahan Wonokusumo merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak. Laut Jawa merupakan batas utara kecamatan ini. Pabean Cantikan adalah batas timur Kecamatan ini. Simokerto, menjadi batas selatan kecamatan ini. Kecamatan Kenjeran yang juga dikenal sebagai batas barat dari kecamatan ini.

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah mengembangkan program pemerintah yang berbeda dalam rangka pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana, dengan tujuan untuk memajukan dan memperluas kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 Pasal 1 angka 3 tentang perluasan kesempatan kerja dalam situasi ketenagakerjaan, terdapat upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menyediakan kesempatan kerja yang telah ada berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur upah, pekerjaan, dan gaji. Pemerintah enggan melibatkan masyarakat dalam program padat karya tersebut.

Mengingat minimnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran di usia produktif, masalah kependudukan Wonokusumo tidak bisa ditertawakan. Masyarakat tentang keterampilan dan sumber daya yang dapat mendukung pencarian kerja. Untuk menilai efektivitas penyampaian layanan program ini, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan warga.

Kinerja secara umum didefinisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang selama periode waktu tertentu ketika menyelesaikan tugas dibandingkan dengan berbagai pilihan, seperti misalnya bekerja di bawah standar, tujuan, atau kriteria kerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Kinerja adalah istilah luas yang mengacu pada beberapa atau semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi selama periode waktu dengan mempertimbangkan sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau yang diantisipasi, efisiensi, tanggung jawab manajemen, atau standar lainnya.

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” secara umum adalah satu atau sekelompok kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum

atas barang, jasa, dan/atau tugas administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik, yaitu setiap pemerintah daerah, dan diatur oleh lembaga, badan, dan organisasi independen yang ditunjuk oleh undang-undang untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

Menurut Mahmudi (2007:128), semua kegiatan pelayanan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dan untuk memenuhi persyaratan hukum.

Dengan menyesuaikan faktor kinerja pelayanan berikut, berdasarkan Rambat Lupiyoadi (2001:148-149):

- 1) Keandalan, meliputi kemampuan desa Wonokusumo dalam merespon dengan cepat dalam memberikan pelayanan program Padat Karya yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Surabaya.
- 2) Daya tanggap, meliputi pemberian pelayanan oleh Desa Wonokusumo secara cepat dan tepat.
- 3) Keamanan yang melingkupi Kecamatan Semampir dan memberikan rasa aman seperti keamanan, ilmu pengetahuan dan kesopanan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Semampir ketika ingin mengikuti program Padat Karya yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Surabaya.
- 4) Empati, termasuk memberikan dukungan profesional kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam proses pelayanan.
- 5) Berwujud berarti fasilitas yang memadai tersedia pada saat layanan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori kinerja pelayanan, jika dianalisis kelima indikator tersebut terlihat bahwa program intensif laboratorium sebenarnya memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, namun jika dilihat dari analisisnya belum mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang itu, apa sebenarnya inovasi aplikasi ini dan bagaimana menggunakan aplikasi Padat Karya ini menjadi alasan penerapan aplikasi ini secara optimal di Kelurahan Wonokusumo. Tentu saja, sebagian besar remaja atau orang dewasa memahami teknologi, tetapi banyak yang tidak.

Berikut jawaban yang diperoleh dari semua indikator tersebut :

- 1) Keandalan atau daya tanggap berkorelasi dengan sejauh mana tingkat layanan selaras dengan preferensi; dalam terobosan ide mengenai Kursus Padat Karya atau dikenal dengan responsiveness telah dilihat di Kantor Desa Wonokusumo selama proses pengabdian masyarakat. Jumlah warga yang bersedia mensurvei penduduk atau orang tidak bersalah yang ingin mencari pekerjaan atau yang pantas berpartisipasi dalam program ini menunjukkan sikap tanggap.
- 2) Daya tanggap atau daya tanggap adalah istilah yang digunakan untuk seberapa efektif suatu program dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan. Bergantung pada hasil analisis, kriteria daya tanggap mengatur jawaban yang memuaskan bagi mereka yang mempekerjakannya. Kesederhanaan penggunaan aplikasi ini, disertai akurasi hasil aplikasi yang diperoleh, menjadi bukti bahwa program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selain itu, tingginya jumlah permintaan dibandingkan dengan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam inisiatif Cash to support Work ini menunjukkan hal ini.



Gambar 21. Survei Masyarakat

- 3) Kepastian atau kepastian sejauh mana Desa Wonokusumo melangkah memberikan kepastian, seperti keamanan, ilmu, dan kesopanan, agar masyarakat mengembangkan keimanan di Desa Wonokusumo. Hal ini ditunjukkan dengan kepiawaian dan keramahan petugas dalam menjelaskan jumlah uang program kerja kepada masyarakat.
- 4) Empati mengacu pada seberapa jauh polisi dapat membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dengan prosedur dukungan pelanggan secara profesional. Hal ini ditunjukkan oleh aparat kepolisian yang berjaga di sekitar areal manfaat Kantor Desa Wonokusumo, siap membantu warga masyarakat yang ingin mengikuti program Padat Karya tersebut atau yang kesulitan mengikuti program tersebut.
- 5) Indikasi nyata atau asli tentang seberapa dekat fasilitas yang sesuai pada saat layanan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan yang tinggal di properti seperti komputer dan lokasi untuk melakukan konseling yang memadai.

Padat Karya Sebagai Solusi Lapangan Pekerjaan Masyarakat

Intinya, sangat melelahkan sepertinya bukan kata baru di Indonesia. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa kegiatan padat karya secara historis menjadi salah satu tonggak pertumbuhan Indonesia, khususnya dalam program swasembada konsumsi pangan. Bahkan hingga saat ini, proyek-proyek padat karya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat masih dilaksanakan dalam berbagai program pemerintah, menghasilkan cukup banyak infrastruktur untuk kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di pedesaan. Karena keberhasilannya, Pemerintah Indonesia bangkit kembali dan meluncurkan kembali strategi pembangunan bangsa yang sangat melelahkan di tahun 2018 yang diberi nama Padat Karya Tunai.

Pekerjaan padat karya didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai (1) pekerjaan berdasarkan penggunaan tenaga kerja yang tersedia (dalam jumlah besar) dan (2) proses pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada modal atau mesin. Kedua definisi tersebut menekankan adanya tugas yang memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Artinya, padat karya menghasilkan kesempatan

kerja untuk berhasil, apakah baru atau meningkat, yang dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja saat ini, menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018, program ini menjadi lebih menyeluruh, holistik, dan integratif. Komprehensif dan holistik mengandung makna bahwa pembangunan desa (dalam contoh ini masyarakat) direncanakan dan dilaksanakan oleh desa itu sendiri, serta mengakomodasi banyak pilihan dan peluang untuk mendukung masyarakat berbasis kearifan lokal yang produktif dan ekonomis. Pembangunan integratif memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk desa itu sendiri, pemerintah daerah, serta melibatkan pemerintah di tingkat pusat (kementerian/lembaga).

Selain itu, Kementerian/Lembaga harus siap menjalankan tugas-tugas padat karya tunai di Desa Wonokusumo. Program padat karya yang dicanangkan pada tahun 2018 dilengkapi dengan karakter multioutcome yang mendorong pencapaian tujuan makro, termasuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Berbagai hasil masuk akal karena, selain mengatasi keberhasilan pembangunan infrastruktur, peran kepemimpinan padat uang ini menghasilkan lapangan kerja baru yang menargetkan populasi pengangguran. Upah yang dihasilkan dari pekerjaan padat karya akan meningkatkan kemampuan individu untuk membeli barang, yang akan meningkatkan konsumsi rumah tangga secara kumulatif.

Perwakilan nasional Tingkat pengangguran (TPT) saat berpartisipasi persentase orang dalam kemiskinan diproyeksikan menurun sebagai akibat dari pekerjaan baru ini. Selain itu, penguatan daya beli membantu meminimalkan disparitas pendapatan di masyarakat. Sebagai langkah untuk menunjukkan komitmennya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah baru-baru ini menetapkan pedoman pembayaran untuk inisiatif yang sangat memakan waktu.

Tuntutan program tenaga kerja memperhitungkan komunitas desa dengan tingkat kesempatan pendidikan yang tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain, ada situasi berbahaya ketidakkonsistenan pelaksanaan lapangan dengan standar dan tata cara yang berlaku karena kurangnya pemahaman membaca masyarakat tentang hukuman ini. Konsekuensinya, pengawasan pada tahap implementasi ini menitikberatkan pada pembentukan kapasitas individu yang terlibat (dalam hal ini masyarakat), sejauh mana melalui sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis, atau bentuk dukungan lainnya.

Tujuan utama dari pengawasan ketepatan manfaat adalah untuk memastikan bahwa ketepatan sasaran dan pelaksanaan manfaat dapat memberikan manfaat yang mencakup tidak hanya melalui perbaikan infrastruktur, tetapi juga dengan membangun ekonomi masyarakat yang fundamental dengan tujuan mengurangi persentase pengangguran secara keseluruhan khususnya meningkatkan kapasitas produktif dan daya beli masyarakat pedesaan.

Direnungkan, peresmian program padat karya yang dikelola secara efektif akan menjadi sarana yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan

pengangguran. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat segera memperoleh uang apa pun yang mereka inginkan dari pekerjaan yang berhasil mereka lakukan melalui program padat karya tunai.

D. PENUTUP

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena terkait dengan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dengan masyarakat dan mendapatkan akses ke bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Nurwati, 2008). Isu kemiskinan masih belum tertangani. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP), khususnya Program Padat Karya Perkotaan (PKP).

Pemerintah (Dispendukcapil Surabaya) sedang berupaya untuk merangsang dimulainya ekonomi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah pemberian perlindungan dan dorongan bagi usaha kecil menengah dan golongan ekonomi bawah agar dapat memperluas usahanya. Berbagai manfaat akan diperoleh dari perluasan organisasi usaha kecil, termasuk perluasan industri konstruksi dan manfaat yang dibawanya bagi perekonomian, serta penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran.

Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang parah didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menawarkan lapangan kerja yang ada berdasarkan perjanjian kerja yang terdiri dari komponen upah dan gaji, pekerjaan, dan tunjangan adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013, Pasal 1 angka 3. Tujuan pemerintah adalah mengikutsertakan masyarakat dalam inisiatif padat karya ini.

Kontribusi dan kemandirian adalah dua komponen penting perkotaan yang menuntut tenaga kerja. stabilitas. Implementasi seiring dengan perluasan program desa menunjukkan keterlibatan masyarakat yang kuat dan signifikan (Supriyadi, 2010: 152). Setiap warga Kelurahan perlu terlibat untuk mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan tuntutan Kelurahan. Masyarakat berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan semacam ini dan berharap dapat berlanjut dengan sendirinya.

Efektivitas adalah serapan dari bahasa Inggris “effective” yang artinya berhasil dengan baik. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* menjelaskan, efektivitas adalah wujud dari keefektifan.

Sebagai wujud komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengupahan untuk usulan padat karya melalui program Padat Karya. Kegiatan pembangunan padat karya mencakup segala sesuatu yang membutuhkan lebih banyak tenaga manusia daripada energi dari mesin. Program padat karya ini bertujuan untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau pekerjaan tetap.

Secara umum pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap penduduk dan warga negara atas produk, jasa, dan/atau bantuan administratif yang diberikan

oleh penyedia layanan yang terbuka untuk setiap orang, yang mencakup setiap lembaga pemerintahan yang dimaksud, perusahaan, yaitu badan hukum milik swasta yang didirikan dengan undang-undang untuk keperluan kegiatan umum yang berkaitan dengan pelayanan, beserta badan hukum tambahan yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan umum.

Sebagai sarana untuk memenuhi komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerintah baru-baru ini menerapkan kebijakan upah untuk inisiatif padat karya. Tuntutan program tenaga kerja menggabungkan masyarakat desa dengan tingkat sekolah menengah yang tidak merata. Dengan kata lain, terdapat bahaya perbedaan pelaksanaan penyidikan dengan pedoman dan standar yang berlaku karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan pada tahap implementasi ini menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia yang terlibat (dalam hal ini masyarakat), baik melalui sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis, maupun cara lainnya.

Ditetapkan bahwa pelaksanaan program padat karya yang disampaikan dengan manajemen yang baik akan menjadi cara yang efektif yang akan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat dapat segera mendapatkan uang tunai yang diinginkan dari pekerjaan yang mereka selesaikan melalui program padat karya tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, D., Feblianto, E., & Ismail, H. (2022). Efektifitas Pelayanan Warga Dalam Pemberlakuan Aplikasi Sayang Warga Di Kelurahan Gun. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(3), 202–212.
- Bella, V. S., Rahmadanik, D., Hariyoko, Y., & Kependudukan, D. (2022). Optimalisasi Aplikasi Klampid New Generation Guna Tingkatkan Kawasan Sadar Administrasi Kependudukan Kecamatan Tambaksari. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(3), 191–201.
- Manembu, R. R., Kusen, S., W, A., & Deeng, D. (2019). Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat Pada Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *HOLISTIK*, 12(2), 1–21.
- Meilinawati, D. T. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 84–96.
- Rahaju, T. (2007). Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Demokrasi*, 6(1), 79–94.
- Ramadhana, F. P., Sadono, T. P., & Widiyanto, M. K. (2022). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Program E-Government di Kantor Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional*, 1(1), 1–5.
- Tama, R. A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi.